

## Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry

Wiwik Sukarni Pertiwi<sup>1</sup>, Alfian Hidayat<sup>1</sup>, Khairur Rizki<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
[wiwiksukarni5@gmail.com](mailto:wiwiksukarni5@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) against discrimination of women in the dowry tradition of India. This study uses the concept of feminism to find out the problem of female discrimination arising from the dowry culture in India, the concept of good governance to understand how the role of the government in handling the dowry issue and the concept of International organization to understand the roles of organizations involved in helping India handle the issues of discrimination stemmed from the dowry culture. This research is a qualitative descriptive research, which uses secondary data derived from library research as its data collection technique. The data is analyzed through five steps: reading, studying significances, data classification, finding patterns and framework construction. The results shows that violence in terms of the tradition of giving dowry is included in cultural violence, because dowry arises from the Hindu tradition which requires the bride to pay dowry to the groom before marriage. In resolving the problem of discrimination against women in the country, the Indian government is not only alone, the Indian government is also assisted by international organizations such as UN Women and CARE.*

**Keywords:** CEDAW, Discrimination of Indian Women, Dowry.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) terhadap diskriminasi perempuan dalam tradisi pemberian dowry di India. Penelitian ini menggunakan konsep feminisme untuk mengetahui permasalahan diskriminasi perempuan yang ditimbulkan dari budaya dowry di India, konsep *good governance* untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan India dalam mengatasi permasalahan dowry di negaranya dan konsep organisasi internasional untuk mengetahui apa saja peranan organisasi internasional dalam membantu India menyelesaikan masalah diskriminasi yang ditimbulkan oleh budaya dowry tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, yang menggunakan data sekunder melalui studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini dianalisis melalui lima tahapan, yakni membaca, melihat signifikansi, klasifikasi data, mencari pola dan konstruksi *framework*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam hal tradisi pemberian dowry termasuk dalam kekerasan kultural, karena dowry ini muncul dari tradisi Hindu yang mengharuskan pengantin perempuan membayar dowry kepada pengantin laki-laki sebelum menikah. Dalam menyelesaikan masalah diskriminasi perempuan di negaranya, pemerintah India tidak hanya sendiri, namun juga dibantu oleh organisasi Internasional seperti UN Women dan CARE.

**Kata Kunci:** CEDAW, Diskriminasi Perempuan India, Dowry.

## PENDAHULUAN

Gender merupakan variabel sosial yang digunakan untuk membedakan peran, tanggung jawab, kebutuhan, peluang dan hambatan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kesetaraan gender merujuk pada kesamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, peluang dan hambatan, dan penilaian bagi kaum lelaki dan perempuan dalam kehidupan sosialnya (Haspels & Suriyasari, 2005, p. 6). Setiap perbedaan yang berdasarkan pada jenis kelamin atau penggolongan lain yang ada di masyarakat seperti etnis, warna kulit, dan agama yang berakibat pada penghilangan atau pengurangan kesetaraan kesempatan dan perlakuan disebut dengan ketidaksetaraan gender.

Salah satu Konvensi HAM, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau yang biasa disebut dengan CEDAW hadir untuk mengatasi permasalahan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di ruang lingkup internasional tersebut. *Bill of Rights of Women* atau Pernyataan tetap Hak-hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia adalah awal dari perumusan CEDAW pada saat Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979. Perumusan konvensi ini diawali dengan rancangan Majelis Umum PBB terkait dengan permasalahan diskriminasi terhadap perempuan yang banyak terjadi terutama di negara berkembang. Konvensi ini diratifikasi pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujuinya (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), n.d.-a). Tujuan disetujuinya CEDAW adalah untuk melindungi dan mengenalkan hak-hak perempuan pada dunia Internasional, yang akhirnya disikapi oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB (*UN Commission on the Status of Women*) sebuah badan yang dibentuk tahun 1947 oleh PBB sebagai dewan pertimbangan serta penyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan posisi perempuan.

Kasus-kasus diskriminasi perempuan lebih banyak terjadi di negara berkembang dibandingkan negara maju, dimana salah satu negara dengan angka diskriminasi perempuan yang tinggi adalah India. India adalah negara dengan keragaman yang sangat besar. Salah satu tradisi yang menjadi sumber diskriminasi terhadap perempuan adalah *dowry* (*mahar* dalam bahasa Arab atau mas kawin dalam bahasa Indonesia)<sup>1</sup>. Orangtua yang ingin menikahkan anak perempuannya harus membayar uang *dowry* yang cukup banyak kepada keluarga pengantin laki-laki, adat tersebut didapatkan dari tradisi agama Hindu. Keluarga pengantin wanita akan merasa malu jika tidak mampu menyediakan uang *dowry* tersebut.

Di India, banyak keluarga dari pengantin laki-laki yang meminta *dowry* dengan jumlah yang besar hingga melampaui batas kemampuan dari keluarga perempuan sehingga dapat menggunakan *dowry* sebagai cara untuk menjadi kaya. Permintaan terhadap *dowry* ini dapat memicu kekerasan dan bahkan pembunuhan, terutama ketika keluarga dari istri tidak mampu memenuhi keinginan suami dan keluarga suaminya. Kekerasan yang dialami istri secara terus-menerus dapat memicu istri untuk bunuh diri, bahkan istri dibunuh oleh suami dan keluarganya, tetapi banyak kasus pembunuhan seperti itu yang disamarkan sebagai kasus bunuh diri.

---

<sup>1</sup>*Dowry* adalah mahar yang diberikan keluarga perempuan kepada laki-laki yang dianggap oleh sang ayah perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuannya dari kemungkinan kekerasan maupun kejahatan yang dilakukan oleh calon suami ataupun mertua.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kematian Akibat *Dowry* di India, dari Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus	8618	8233	8083	8455	7634

Sumber: National Crime Records Bureau (2015, p. 4, 2017, p. 4)

Berdasarkan data Tabel 1, pada tahun 2011 kasus *dowry deaths* (kematian akibat *dowry*) terjadi sebanyak 8.618 kasus, yang berarti setiap satu hari 23 perempuan mati karena *dowry* dan sebagian besar dari mereka yang menjadi korban pembunuhan terkait pembayaran *dowry* adalah pengantin baru. Akibat banyaknya kasus diskriminasi terhadap perempuan di India dan protes terhadap kasus-kasus diskriminasi tersebut, pemerintah India pun merespon hal ini dengan cara diratifikasinya CEDAW. Pemerintah India meratifikasi Konvensi CEDAW pada tahun 1993 (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), n.d.-b). UN Women, salah satu organisasi internasional turut mengambil peran dalam menangani kasus diskriminasi perempuan di India ini.

Selain UN Women, terdapat juga CARE, salah satu organisasi internasional lain yang turut membantu pengentasan diskriminasi perempuan di India. Ada banyak langkah yang diambil oleh Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di India dan Organisasi Internasional yang ditujukan untuk mengembangkan kesetaraan perempuan di India. Maka, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini adalah “Bagaimana implementasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) tentang diskriminasi perempuan dalam tradisi pemberian *dowry* di India?”

## TINJAUAN PUSTAKA

*Pertama*, Ratika Sharma dalam penelitiannya yang berjudul “*Gender Inequality in India: Causes and Remedies*” yang membahas mengenai ketidaksetaraan gender yang tercermin dalam realita sehari-hari kehidupan perempuan dan anak perempuan, termasuk jumlah perempuan yang tidak proporsional, di antara mereka yang hidup dalam kemiskinan (Sharma, 2015). Di India, wanita disembah sebagai dewi, tetapi masih sering dirampas hak asasi manusianya. Mereka dianggap sebagai kelompok terpinggirkan dan warga negara kelas dua. Bangsa Amerika menempatkan India sebagai negara berpenghasilan menengah. Temuan dari Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa India adalah salah satu negara terburuk di dunia dalam hal ketidaksetaraan gender. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari surat kabar dan berbagai organisasi otentik sebagai dasar analisis. Penelitian ini menyelidiki berbagai aspek ketimpangan gender yang berlaku di India. Penelitian ini juga akan menyarankan beberapa solusi untuk meningkatkan status perempuan dalam masyarakat India.

Perbedaan penelitian Sharma dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus bagaimana peran pemerintah India dalam mengimplementasikan CEDAW untuk mengatasi masalah diskriminasi perempuan di India, terutama masalah *dowry*. Di sisi lain, penelitian Sharma membahas mengenai ketidaksetaraan gender di India dari penyebab hingga solusi dari masalah tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ketidaksetaraan gender di India. Penelitian Sharma juga tidak membahas bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan diskriminasi tersebut melalui Konvensi CEDAW.

*Kedua*, penelitian Dr. E. Raju, M.A., M.Phil., Ph.D yang berjudul “*Gender Discrimination in India*” yang membahas mengenai kondisi India setelah kemerdekaan di India. Salah satu masalah yang menarik perhatian para pembuat kebijakan di kondisi pasca kemerdekaan adalah masalah gender (Raju, 2014). Masalah gender telah menjadi arena kebijakan pusat. Masalah kesetaraan gender dan keadilan dianggap menambah signifikansi dalam konteks antara persepsi kebijakan ekonomi baru dan hubungan gender. Kesetaraan gender menjadi bagian dari strategi negara untuk memberantas kemiskinan dan penderitaan perempuan.

Para pembuat kebijakan sangat percaya bahwa komitmen positif terhadap kesetaraan gender akan memperkuat setiap bidang tindakan untuk mengurangi kemiskinan, karena perempuan dapat membawa energi dan wawasan baru di India. Perbedaan penelitian Raju dengan penelitian ini adalah penelitian ini juga akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW untuk mengatasi diskriminasi perempuan di India, terutama diskriminasi perempuan dalam hal *dowry*. Penelitian Raju membahas bagaimana diskriminasi perempuan di India terjadi dan bagaimana kesetaraan gender menjadi bagian dari strategi negara untuk memberantas kemiskinan dan penderitaan perempuan di India (Raju, 2014).

*Ketiga*, Priti Jha dan Niti Nagar dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*A Study of Gender Inequality in India*”, mempertimbangkan ketidaksetaraan gender yang ada di antara setiap wilayah, kelas sosial dan mencegah pertumbuhan ekonomi India demi meningkatkan kehidupan masyarakat India (Jha & Nagar, 2015). Realita ketidaksetaraan gender di India sangat kompleks dan beragam, karena hal tersebut ada di setiap bidang seperti pendidikan, peluang kerja, pendapatan, kesehatan, masalah budaya, masalah sosial, masalah ekonomi dan lain-lain. Upaya telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang bertanggung jawab atas masalah ketidaksetaraan gender di India. Jadi, penelitian ini menyoroti konteks multi-dimensi ketidaksetaraan gender lazim di India.

Penelitian ini secara keseluruhan lebih menjelaskan ketidaksetaraan dalam ekonomi, sosial, budaya dan bias hukum yang merupakan tantangan besar bagi pembuat kebijakan dan ilmuwan sosial untuk membangun persamaan hak di seluruh bidang sosial. Para peneliti telah mencoba menyarankan beberapa strategi dan implikasi kebijakan yang relevan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender ini dan mempromosikan posisi bermartabat untuk wanita India. Perbedaan penelitian Jha dan Nagar dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih membahas bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW untuk mengatasi diskriminasi perempuan di India, terutama masalah diskriminasi perempuan dalam hal *dowry*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Alat pengumpul data dari pendekatan ini adalah peneliti sendiri (Usman, 2014, p. 78). Dalam pendekatan ini, peneliti juga disebut sebagai *human instrument*. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan logika berpikir induktif (dari khusus ke umum atau dari data-data yang peneliti temukan dan menjadi sebuah kesimpulan umum) (Usman, 2014, p. 111).

Teknik pengumpulan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diartikan sebagai pengumpulan data langsung dari pihak atau lingkungan pertama dari permasalahan yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan proses pengumpulan data dari data yang sudah ada dari dokumen tertentu, sehingga pengumpulan data sekunder disebut sebagai dokumentasi (Sarwono, 2006, pp. 123–124). Pengumpulan data sekunder berkaitan dengan penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya (Mardalis, 2017, p. 28).

Peneliti belum dapat terjun langsung ke lapangan untuk meneliti karya tulis ini, maka peneliti masih mengumpulkan data secara sekunder tentang bagaimana peran pemerintah India, LSM di India, dan organisasi internasional dalam mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India. Tulisan ini juga dibantu dari media-media yang telah disebutkan di atas, namun data sekunder yang didapatkan juga merupakan hasil dari penelitian dari pihak-pihak yang telah turun ke lokasi penelitian secara langsung.

Adapun urutan analisis data pada metode kualitatif adalah pertama, membaca berkali-kali data yang diperoleh sambil mengurangi informasi tumpang tindih atau berulang-ulang. Kedua, melihat signifikansi atau pentingnya data yang diperoleh. Ketiga, mengklasifikasikan data yang memiliki kemiripan atau kecocokan dengan data lain. Keempat, mencari pola atau tema yang mengikat pikiran yang satu dengan lainnya. Kelima, mengkonstruksikan *framework* untuk mendapatkan esensi dari apa yang hendak disampaikan oleh data tersebut (Raco, 2010, pp. 120–122).

## KERANGKA PEMIKIRAN

### FEMINISME

Feminisme mengacu pada gerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki untuk meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (Hidayati, 2018). Istilah ini muncul pada tahun 1980-an, sebagai acuan pada teori kesetaraan gender. Dalam sejarah perkembangannya, latar belakang munculnya feminisme adalah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehingga pada akhirnya akan timbul kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidaksetaraan tersebut. Kemudian, feminisme sebagai suatu gerakan politik berakar pada gerakan yang dalam akhir abad ke-19 di berbagai negara Barat dikenal sebagai gerakan kaum *suffrage*<sup>2</sup>. Gerakan ini bertujuan memajukan kaum

---

<sup>2</sup> Gerakan Kaum *Suffrage* adalah gerakan adalah gerakan yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan, baik mengenai kondisi kehidupannya maupun status dan perannya di dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sosialnya sehari-hari.

perempuan, baik mengenai kondisi kehidupannya maupun status sosial dan peranannya dalam kehidupan sosial (Sadli, 2010, p. 59). Berkembangnya feminisme didorong oleh munculnya perempuan-perempuan modern dan kontemporer yang mulai mengintervensi banyak aspek kehidupan, mulai dari keterlibatan mereka dalam kegiatan militer dan ekonomi global, dimana salah satu keberhasilannya diwujudkan oleh gerakan untuk menuntut hak pilih bagi perempuan di Inggris dan Amerika Serikat (Burchill & Linklater, 2011, p. 283).

Selain menitikberatkan masalah peran gender, menurut Viotti dan Kauppi (2014) dalam Ramadan & Ma'sumah (2018, p. 146), asumsi besar lainnya yang dipaparkan oleh kaum feminisme adalah pengembangan emansipasi perempuan dengan menghapuskan ketimpangan gender yang diakibatkan oleh budaya patriarki. Kini gerakan feminisme terbagi dalam beberapa aliran seperti berikut: *Pertama*, feminisme liberal yang berasumsi bahwa kebebasan dan kesetaraan berakar pada rasionalitas, maka kaum perempuan harus diberi hak yang sama dengan lelaki. Feminisme liberal juga menolak penyamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan, perempuan juga memiliki perbedaan berdasarkan fungsi reproduksi dan kodratnya. *Kedua*, feminisme radikal yang muncul sebagai reaksi atas *seksisme*<sup>3</sup> di Barat tahun 1960-an, mereka percaya bahwa penindasan perempuan berakar pada kaum lelaki dan ideologi patriarki. Penguasaan kaum perempuan secara fisik oleh laki-laki adalah bentuk penindasan. Kaum feminisme radikal menganggap bahwa budaya patriarki dalam masyarakatlah yang membuat perempuan mengalami tindakan diskriminasi dari kaum laki-laki.

*Ketiga*, feminisme marxis yang beranggapan bahwa gagasan biologis tidak pantas dijadikan dasar analisis dalam menentukan bagaimana perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan yang lebih baik dalam hidup. Engels yang analisisnya dijadikan landasan oleh aliran ini menganggap bahwa jatuhnya status perempuan bukan karena perubahan teknologi. Menurut aliran ini, laki-laki dianggap lebih mendominasi hubungan sosial dan ekonomi.

*Keempat*, feminisme sosialis yang muncul sebagai kritik atas metode historis materialis Marx dan Engels serta mengakomodasi politik kaum radikal. Revolusi Sosialis yang dilakukan oleh Rusia, Tiongkok dan negara lain pun tidak dapat menaikkan posisi perempuan yang selalu berada di bawah laki-laki. Atas dasar itu, mereka menolak visi dari Marxis klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar diskriminasi perempuan (Shiva, 1997, pp. 6–7). Teori ini penulis anggap tepat dalam menganalisis penelitian ini karena dapat menjelaskan bagaimana kondisi diskriminasi gender di India terutama dalam *dowry*, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam feminisme berasumsi bahwa penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki berakar pada ideologi patriarkinya.

#### GOOD GOVERNANCE

Konsep *good governance* adalah seperangkat aturan, norma, dan nilai yang dibentuk oleh aktor hubungan internasional yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik umumnya mengacu

---

<sup>3</sup> *Seksisme* menurut Kamus Merriam Webster adalah prasangka atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, khususnya diskriminasi terhadap perempuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *seksisme* adalah penggunaan kata yang meremehkan atau menghina berkenaan dengan kelompok, gender, ataupun individu.

pada daftar karakteristik dan prinsip yang mengagumkan serta acuan tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah seharusnya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat (Grindle, 2010, p. 2). Prinsip-prinsip tersebut meliputi: akuntabilitas, transparansi, responsivitas, kesamaan dan keadilan, efektivitas dan efisiensi, tegaknya supremasi hukum, partisipatif, dan representatif/ berorientasi pada konsensus. Dalam pelaksanaannya, *good governance* melakukan penguatan institusi yang demokratis, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi (Kusumaningrum, 2013).

Konsep ini penulis anggap tepat dalam menganalisis penelitian ini dikarenakan penelitian ini membahas bagaimana implementasi CEDAW di India, dalam tulisan ini penulis menggunakan prinsip efektivitas dan efisiensi dari *good governance* sebagai acuan dalam menganalisis kasus diskriminasi gender di India. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah India juga turut mengambil peran dalam menangani kasus diskriminasi gender di negaranya dengan cara bekerjasama dengan organisasi internasional dan turut serta dalam mengimplementasikan CEDAW agar masalah diskriminasi perempuan di India dapat teratasi.

## ORGANISASI INTERNASIONAL

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya yang berjudul "*Administrasi dan Organisasi Internasional*", organisasi internasional didefinisikan sebagai kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap dan diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan sesuai agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2009, p. 9). Syarat suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi internasional yaitu harus memiliki organ permanen, yang mana obyeknya tidak mencari keuntungan sepihak saja, namun juga untuk kepentingan semua pihak atau negara dan anggota yang tergabung dalam organisasi. Selain itu, struktur organisasi maupun pelaksanaannya harus jelas dan lengkap sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Organisasi internasional memiliki beberapa peran, yaitu sebagai forum untuk bekerjasama antar sesama negara anggota, sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, *peace keeping operation* dan lain-lain) (Rudy, 2009, p. 27). Terdapat enam fungsi organisasi internasional dalam buku Kara Karnst dan Mingst, dimana penulis hanya akan menggunakan fungsi kelima yaitu *rule supervision*, atau yang memonitor pelaksanaan peraturan, mengadili sengketa, serta pengambilan langkah-langkah penegakan peraturan (Karns & Mingst, 2010, p. 7). Konsep organisasi internasional digunakan dalam penelitian ini mengingat bahwa UN *Women* dan CARE adalah suatu organisasi internasional dan peran UN *Women* dan CARE erat kaitannya dengan dengan konsep organisasi internasional, serta fungsi kelima yang sudah disebutkan di atas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan organisasi internasional sebagai landasan konseptual penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

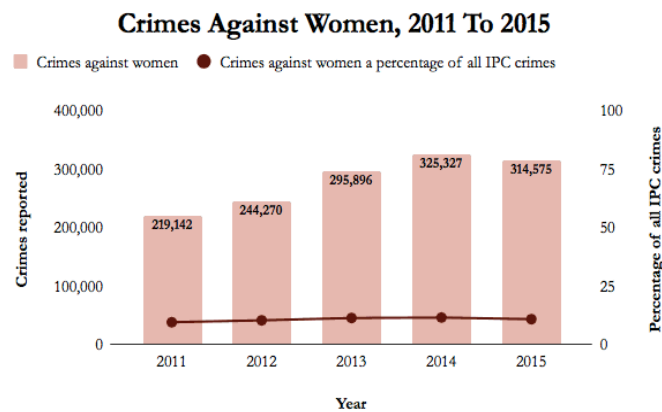
### DISKRIMINASI PEREMPUAN DI INDIA

Masyarakat di India sebagian besar masih menjalani budaya *patrilineal* atau pendominasian oleh laki-laki, dimana ayah sebagai kepala keluarga yang mengambil berbagai keputusan dalam keluarga. Dengan kata lain, laki-laki adalah pemilik keluarga. Faktanya, di banyak negara berkembang termasuk India, diskriminasi perempuan masih terjadi dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, nilai-nilai, adat istiadat, atas nama kasta, serta pada norma pelecehan seksual (Shastri, 2014, p. 28). Diskriminasi perempuan dapat menciptakan rintangan dalam partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, politik dan ekonomi. Budaya *patrilineal* dapat dikatakan berdampak buruk bagi masyarakat India.

#### ***Bentuk-bentuk Diskriminasi Perempuan di India***

- *Kekerasan terhadap Wanita*

Grafik 1. Tindak Kekerasan terhadap Wanita di India



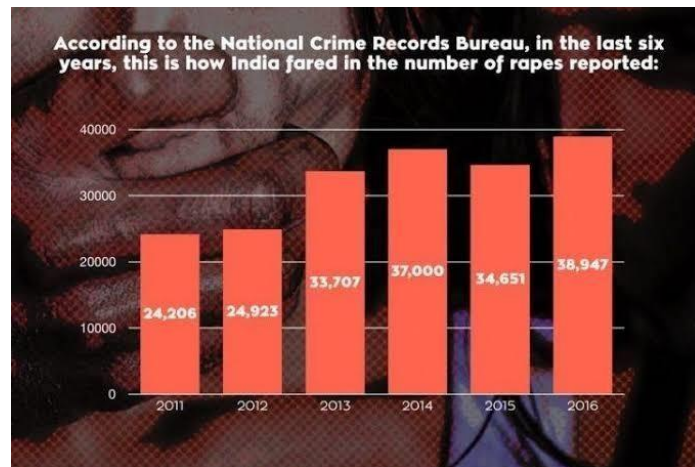
Sumber: (Shah, 2017)

Tampak dalam Grafik 1 bahwa tingkat kejahatan terhadap wanita di India masih sangat tinggi. Kejahatan terhadap wanita yang dicatat oleh *National Crime Records Bureau*, sebuah divisi dari Kementerian Dalam Negeri India, mengatakan bahwa kejahatan tersebut naik 43,5% yang disebabkan oleh peningkatan kejahatan atau karena perempuan lebih percaya diri melaporkan kejahatan terhadap mereka. Salah satu faktor tingginya angka diskriminasi dan kejahatan kepada wanita di India adalah budaya di India yang terlalu mengagungkan laki-laki dan menomorduakan wanita dalam sistem sosial mereka. Faktanya, masyarakat di India masih banyak yang menjalankan tradisi dan budaya yang bersifat diskriminatif bagi kaum perempuan (Shah, 2017).



- *Pemeriksaan terhadap Wanita*

Grafik 2. Kasus Pemeriksaan terhadap Wanita di India Tahun 2011-2016



Sumber: (Sengar, 2019)

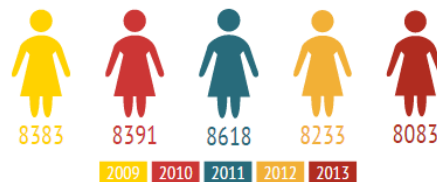
Grafik 2 menunjukkan bahwa kasus tindak pemerkosaan di India cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada 2011 terdapat 24.206 kasus, 2012 terdapat 24.923 kasus, pada 2013 33.707 kasus, pada 2014 terdapat 37.000 kasus, pada 2015 turun ke angka 34.652 kasus dan pada 2016 naik kembali menjadi 38.957 kasus pemerkosaan. Akibat banyaknya kasus pemerkosaan di India, hal ini menyebabkan tidak hanya menjadi perhatian pemerintahan nasional India, tetapi juga mendapat perhatian pihak-pihak internasional. Terdapat sesuatu yang bias dalam pikiran para pembuat keputusan, mulai dari stereotip perempuan, menyalahkan korban, mencoba mencari tahu apakah korban yang mengundang aksi pemerkosaan.

Masalah pemerkosaan ini menjadi semakin meningkat sejak banyak kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan. Ada tekanan dari pihak keluarga untuk tutup mulut, sehingga sulit untuk diketahui apakah banyak peningkatan jumlah kasus pemerkosaan yang ditutup-tutupi (McCoy, 2014). Penelitian ini berfokus pada diskriminasi perempuan dalam hal *dowry*, maka pada penelitian ini akan banyak disajikan data mengenai diskriminasi dalam hal *dowry* tersebut. Hal ini berkaitan dengan keluarga calon pengantin perempuan di India harus membayarkan *dowry* kepada keluarga pengantin laki-laki dan hal ini mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dapat berujung pada kematian pengantin perempuan tersebut. Ketika pemerintah India mengeluarkan undang-undang larangan memberi dan menerima *dowry* dalam pernikahan yang disebut dengan *Dowry Prohibition Act 1961*, hal ini secara ironis mengakibatkan fenomena baru di tahun 1980-an muncul yang disebut sebagai *dowry deaths*. Hal ini mengakibatkan *Dowry Prohibition Act 1961* diamandemen pada tahun 1984 dan 1986.

- *Dowry Deaths* (Kematian Akibat Mahar)

Gambar 1. Jumlah Kasus Kematian *Dowry Deaths* di India

### Dowry Deaths In India



Source: NCRB

Sumber: (Salve & Mallapur, 2014)

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa kasus *dowry deaths* di India terhitung cukup besar. Pada tahun 2009 sebanyak 8.383 kasus, tahun 2010 sebanyak 8.391 kasus, tahun 2011 sebanyak 8.618 kasus, tahun 2012 sebanyak 8.233 kasus, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 8.083 kasus, yang jika dijumlahkan keseluruhan menjadi 41.708 kasus kekerasan pada perempuan yang disebabkan oleh kekerasan akibat masalah *dowry* yang dianggap kurang oleh pengantin laki-laki.

Tabel 2. Tabel Data *Dowry Deaths* di Beberapa Wilayah di India Pada Tahun 2015

#### TOP FIVES STATES WITH MOST NUMBER OF DOWRY DEATH CASES REGISTERED

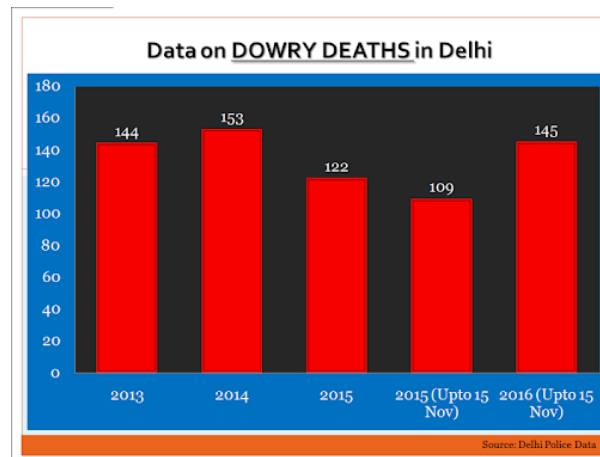
STATES	DOWRY DEATH CASES REPORTED IN 2015
Uttar Pradesh	2335
Bihar	1154
Madhya Pradesh	664
West Bengal	498
Rajasthan	463

Source- National Crime Records Bureau

Sumber: (Agarwal & Nayagam, 2017)

Pada Tabel 2 terdapat data dari kasus *dowry deaths* di beberapa wilayah di India pada tahun 2015. Pada wilayah Uttar Pradesh sebanyak 2.335 kasus, wilayah Bihar sebanyak 1.154 kasus, pada wilayah Madhya Pradesh sebanyak 664 kasus, pada wilayah West Bengal sebanyak 498 kasus, dan pada wilayah Rajasthan sebanyak 463 kasus. Jika ditotalkan pada kelima wilayah tersebut, maka kasus kematian akibat *dowry* menjadi 5.114 (Agarwal & Nayagam, 2017).

Grafik 3. Data Dowry Deaths di New Delhi 2013 - 2016



Sumber: (Crime In Delhi, 2016)

Grafik 3 menunjukkan data jumlah korban kasus *dowry deaths* di New Delhi, ibukota India, pada tahun 2013 sampai November 2016. Kejahatan *dowry deaths* ini merupakan kejahatan moral yang menonjol dalam masyarakat India. Tahun 2013 terdapat 144 kasus *dowry deaths* yang terdaftar di New Delhi. Jumlah ini meningkat menjadi 153 pada tahun 2014. Tahun berikutnya melihat penurunan jumlah kasus kematian *dowry* menjadi 122. Pada tahun 2015 (hingga 15 November), Kepolisian Delhi telah mendaftarkan 145 kasus *dowry deaths* yang cukup tinggi dibandingkan dengan 109 kasus yang dilaporkan selama periode yang sama di tahun sebelumnya (Crime In Delhi, 2016).

Sebelum adanya *Dowry Prohibition Act*, Mahatma Gandhi seorang aktivis India mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Mahatma Gandhi melalui tulisan-tulisan gencar melakukan kampanye sistem anti *dowry* dalam pernikahan di India. Mahatma Gandhi mengkampanyekan bahwa masyarakat India sebaiknya menikah atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan karena keinginan memiliki *dowry*. Pemberlakuan *dowry* dalam pernikahan menurut Mahatma Gandhi adalah hal yang salah dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti praktik yang berlaku di masyarakat. Dalam setiap kampanye yang dipimpinnya, Gandhi menghimbau golongan kasta tinggi sampai golongan *harijan*<sup>4</sup>, mulai dari Bombay (Mumbai) sampai desa-desa terpencil di Gujarat, Maharashtra dan Bengal untuk saling mendekati dan melakukan kawin silang serta menikah atas dasar kasih sayang dan sukarela.

Tradisi *dowry* di India seiring berkembangnya zaman semakin membuat perempuan terkena kasus-kasus diskriminasi dalam berbagai bentuk karena tidak dapat membayar *dowry* sesuai dengan keinginan suami dan keluarganya. Jumlah kematian perempuan di India yang disebabkan oleh *dowry* justru terus menunjukkan peningkatan. Meskipun telah ada usaha oleh pemerintah India untuk menghapus praktik *dowry* dalam pernikahan di India, namun usaha-usaha

<sup>4</sup> Harijan dalam Bahasa India artinya tidak tersentuh. Maksudnya disini adalah sebutan untuk kasta terendah/tertindas di India.

tersebut belum membuahkan hasil yang positif. Tradisi pemberian *dowry* ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan dan diskriminasi perempuan di India (Resen, 2012). Pembunuhan yang terkait dengan *dowry* biasanya dilakukan dengan cara menenggelamkan wanita ke dalam sumur, meracuni dengan racun serangga, menyiram air keras ke wajah istri atau biasa dikenal dengan *burnt wife syndrome*<sup>5</sup> dan membakar. Membakar adalah salah satu cara yang banyak digunakan untuk membunuh pengantin wanita. Hal ini dikarenakan cukup sulit untuk menyelidiki apakah kematian wanita tersebut adalah karena pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Kasus-kasus perempuan meninggal karena kecelakaan dapur lazim ditemukan, karena penggunaan sari atau pakaian khas perempuan India (Banerjee, 2014, p. 36).

Praktik *dowry* ini membuat diskriminasi ini meluas ke berbagai bidang. Sejak lahir, perempuan sudah dianggap sebagai beban keluarga. Anak laki-laki sering dipandang sebagai aset bagi keluarga karena mereka bisa melakukan pekerjaan banyak pekerjaan, meneruskan nama keluarga, sebagai perawat orangtua mereka di hari tua, dan menjamin keamanan bagi keluarga sehingga orang tua memilih untuk memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Banyak masyarakat yang percaya bahwa tempat perempuan hanya di rumah.

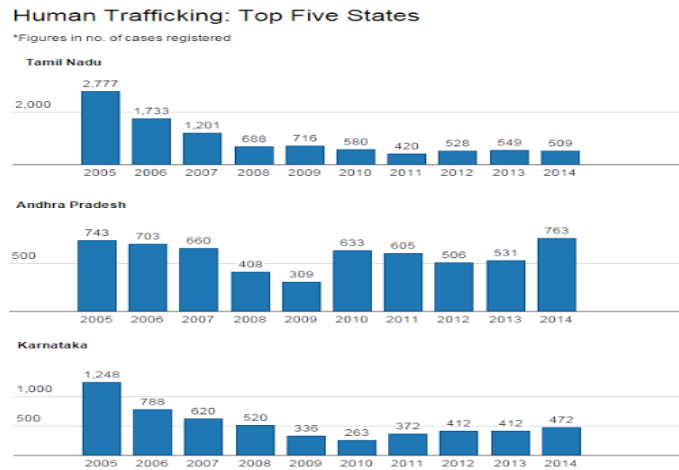
Masyarakat India masih hidup dibawah budaya patriarki, yang artinya mereka selalu menomorduakan perempuan dibandingkan laki-laki. Banyak perempuan India yang tidak dapat menikmati kehidupan modern seperti di negara lain, kurang mendapat kesempatan untuk berpendidikan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, dan banyak aspek lain lagi dalam kehidupan di India yang menomorduakan perempuan. Meskipun India cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat, namun hal tersebut tidak merubah kesetaraan gender menjadi lebih baik. Sayangnya, mempekerjakan anak gadis sebagai pekerja seks komersial masih dianggap sesuatu yang wajar bagi sebagian daerah di India. Anak-anak gadis mereka dipaksa menjadi pekerja seks komersial dan dianggap sebagai persembahan untuk Tuhan. Tradisi ini bernama *devdasi*, yang pada mulanya sebagai persembahan keagamaan, namun seiring berjalannya waktu dijadikan sebagai ladang uang bagi orang-orang yang tidak baik.

---

<sup>5</sup> *Burnt Wife Syndrome* adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga di India yang dilakukan oleh seorang suami atau keluarganya kepada istrinya karena penolakan keluarga sang istri untuk membayar mahar tambahan, istri biasanya disiram dengan minyak tanah atau cairan mudah terbakar lainnya yang dapat menyebabkan kematian terhadap sang istri.

- *Human Trafficking*

Grafik 4. *Human Trafficking* di Tiga Negara Bagian India



Sumber: (Mallapur, 2015)

Grafik 4 menunjukkan data dari *National Crime Records Bureau* mengenai *human trafficking*, dimana jumlah *human trafficking* di negara bagian Tamil Nadu tidak menentu, seperti yang ditunjukkan dari tahun 2010 sampai 2014 terdapat 2586 kasus, negara bagian Andhra Pradesh dari 2010 sampai 2014 terdapat 3038 kasus, negara bagian Karnataka terdapat 1931. Pada tahun 2014, India telah melaporkan lonjakan hampir 39% dalam jumlah kasus terdaftar di seluruh negeri untuk kasus *human trafficking*. Kawasan yang paling terkenal dengan prostitusi di India terdapat di kawasan Sonagachi di Kota Kolkatta, India. Jika di Indonesia, kawasan ini sama seperti Gang Dolly di Surabaya. Ketimpangan sosial perekonomian masyarakat di India menjadi salah satu penyebab maraknya praktek prostitusi tersebut. Hal lain yang menjadi alasan diskriminasi perempuan di India adalah tradisi yang sudah mengakar di masyarakat India yang menempatkan status perempuan berada di bawah laki-laki. Kondisi seperti ini tentunya membuat bisnis prostitusi semakin marak, terutama karena jumlah masyarakat miskinnya yang banyak (Hakim, 2017, p. 35).

Beberapa undang-undang telah ditetapkan agar dapat memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di India. Undang-undang tersebut adalah *Dowry Prohibition Act*, *Equal Remuneration Act* pada 1986, *The Islamic Women (Protection of the Right to Divorce) Act* pada 1986, *The Commission of Sati (prevention) Act* pada 1987, *The Hindu Marriage Act* pada 1956, *The Hindu Succession Act* pada 1956, *Protection of Women from Domestic Violence Act* pada 2005, dan masih banyak lagi undang-undang lain yang mengatur mengenai masalah diskriminasi perempuan di India. Banyak undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah India, namun dalam

pengimplementasiannya masih kurang dan juga terdapat ketidakadilan bagi perempuan saat ingin menyelesaikan kasus diskriminasi yang telah dialaminya.

Pemerintah India juga telah mengamandemen kebijakan terkait kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, salah satunya adalah Hukum Pidana (Amandemen) 2013 dan perubahan pada KUHP India (*Indian Penal Code-IPC*) bagian 354A bahwa melakukan pelecehan seksual dinyatakan sebagai pelanggaran dan dihukum hingga tiga tahun penjara atau denda. Namun, dalam pengimplementasiannya masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dan tidak mendapat keadilan atas kasus yang menimpa mereka. Dalam rangka menanggulangi banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di India, pemerintah India pun merespon hal ini dengan cara diratifikasinya Konvensi CEDAW. Pemerintah India meratifikasi Konvensi CEDAW pada tahun 1993 (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), n.d.-b).

## GERAKAN-GERAKAN PROTES DISKRIMINASI PEREMPUAN DI INDIA

Seperti yang telah peneliti sebutkan pada sub-bab sebelumnya, diskriminasi perempuan di India sangat beragam dan beberapa bentuk diskriminasi perempuan yang rentan terjadi adalah kekerasan, pemerkosaan, *dowry deaths*, dan *human trafficking*. Akibat tingginya angka kasus diskriminasi perempuan di India, muncullah berbagai gerakan protes terhadap diskriminasi perempuan tersebut antara lain adalah gerakan *#MeToo* untuk kasus pemerkosaan, gerakan melawan *human trafficking*, *anti-dowry*, dan *say no to dowry*.

### 1. Gerakan *#MeToo*

*#MeToo movement* atau Gerakan *#MeToo* adalah sebuah gerakan yang ditujukan untuk memprotes kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Puncak dari *#MeToo* India adalah pada akhir tahun 2019, ketika para wanita berbagi cerita pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya yang mereka tak berani ceritakan sebelumnya di media sosial. Terdapat kasus yang menarik banyak perhatian masyarakat, yang pertama adalah tuduhan yang melibatkan mantan staf junior terhadap hakim tinggi negara India. Dalam pernyataan tertulis yang disumpah, karyawannya menuduh bahwa kepala pengadilan India, Ranjan Gogoi, telah melecehkannya secara seksual (Masih, 2019).

### 2. Gerakan Melawan *Human Trafficking*

Menurut Indeks Perbudakan Global 2016, diperkirakan 46 juta orang diperbudakan di seluruh dunia, dengan lebih dari 18 juta yang tinggal di India. Data ini disusun oleh *Walk Free Foundation*, sebuah organisasi global yang bertujuan untuk mengakhiri perbudakan modern. Banyak diantara mereka adalah penduduk desa yang dibujuk oleh para pedagang dengan janji pekerjaan yang bagus dan pembayaran di muka, namun setelah mereka mau mereka malah dijual sebagai budak seksual. *My Choices Foundation* menggunakan teknologi yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi desa-desa yang paling berisiko perbudakan modern, kemudian meluncurkan kampanye lokal untuk mengatasi kasus tersebut (VOA News, 2017).

### 3. *Anti-Dowry*

Praktik mas kawin masih terus berlangsung tanpa hambatan, meskipun *Dowry Prohibition Act* telah ada sejak 1961, Ketika tidak dituntut secara langsung, tersirat bahwa keluarga pengantin perempuan harus memberikan 'hadiah' dan menyediakan standar hidup tertentu untuk pengantin pria dan keluarganya. Jika ada penolakan, maka selalu ada kemungkinan pengantin wanita dilecehkan atau bahkan dibunuh, kejahatan yang bahkan tidak termasuk dalam undang-undang *dowry* dan harus menunggu sampai 1983 untuk dianggap sebagai kejahatan 'legal'. Maka dari itu, banyak muncul gerakan-gerakan untuk memprotes *dowry* ini, termasuk gerakan *anti-dowry* atau gerakan menentang tuntutan mahar (Nagpal, 2017).

Gerakan *anti-dowry* dan pelecehan mencapai puncaknya pada 1980-an, meskipun kampanye melawan *dowry* telah dilakukan sebelumnya. Protes awal terhadap *dowry* dalam gerakan feminis pasca-kemerdekaan dibuat oleh *Progressive Organization of Women* di Hyderabad pada tahun 1975, dengan 2.000 orang muncul di satu di antara banyak demonstrasi. Membasmi *dowry* juga merupakan agenda gerakan wanita lain seperti Gerakan Shahada tahun 1972 (Nagpal, 2017).

Namun, pada tahun 1977, gerakan ini mendapatkan momentum ketika tuntutan diajukan di Delhi, dan tidak hanya mengakhiri mas kawin, tetapi juga mengakhiri kejahatan yang dilakukan untuk *dowry*, terutama pembunuhan dan kemungkinan bunuh diri. Sejak saat itu, telah dilakukan protes di negara bagian lain, termasuk Punjab, Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh dan Bengal. Namun, gerakan itu melihat aksi terbesar di Delhi, mungkin karena Delhi memiliki jumlah pembunuhan mas kawin tertinggi di negara itu (Nagpal, 2017).

### 4. *Say No to Dowry*

Gerakan *Say No to Dowry* adalah gerakan yang dilakukan oleh *Melbourne's Indian Community* atau Komunitas India di Melbourne. Mereka mengucapkan "maaf, maaf, tidak ada *dowry*" sambil menari dan menyanyikan lagu mereka di Federation Square. Mereka berdemonstrasi dengan mengenakan baju pengantin tradisional India. *Walk Against Dowry* menyerukan agar praktik tersebut dilarang dan diatur oleh hukum tradisi berabad-abad, dimana keluarga pengantin wanita memberikan uang tunai dan barang-barang berharga kepada keluarga mempelai pria, telah ilegal di India sejak 1961, tetapi tetap tersebar luas (Booker, 2014).

## HAK ASASI MANUSIA DAN CEDAW DI INDIA

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. HAM muncul dalam berbagai situasi, contohnya dalam persoalan hak anak atau diskriminasi ras dan gender atau seks. HAM adalah standar minimal bagi terciptanya kehidupan yang adil, sehingga HAM lebih difokuskan untuk menghindari ketidakadilan (Iskandar, 2010, p. 54). Dalam pembahasan HAM, hal yang paling fundamental adalah kesetaraan dan keadilan. Menurut Dworkin, prinsip kesetaraan menuntut manusia tidak boleh menyakiti orang lain hanya demi kesenangan pribadi atau kelompoknya. Dalam isu gender, prinsip kesetaraan

menjadi bagian yang paling dasar bagi CEDAW dan bagi HAM. Pendekatan yang digunakan oleh CEDAW menurut Charlesworth, tidak jauh berbeda dengan CERD (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), dan hampir sama dengan deklarasi PBB 1981 tentang penghapusan segala jenis diskriminasi yang di dasarkan pada kepercayaan atau agama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh definisi yang diberikan oleh keduanya (Iskandar, 2010, p. 66).

Negara berkembang lebih rentan akan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender, dimana salah satunya adalah India. Salah satu faktor yang membuat India menjadi negara dengan kasus ketidaksetaraan yang cukup tinggi adalah pengaruh sosial budaya yang mendukung bahwa laki-laki lebih memiliki *power* daripada perempuan. Akibat tingginya tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuannya, India ikut serta dalam mengurangi kasus-kasus diskriminasi perempuan di negaranya dengan cara meratifikasi CEDAW. India menandatangani CEDAW pada 30 Juli 1980 dan meratifikasinya pada 9 Juli 1993. India belum meratifikasi Protokol Opsional untuk CEDAW. Fokus India dalam meratifikasi konvensi ini adalah karena kekerasan terhadap perempuan di negaranya, menyoroti isu-isu utama terkait dengan ketentuan diskriminatif dalam hukum di negaranya, dan implementasi undang-undang perlindungan perempuan dan hak perempuan (Khanna, 2013).

Komite CEDAW meminta pemerintah untuk menegakkan undang-undang tentang pekerja terikat dan memberi perempuan kesempatan kerja mandiri dan upah minimum produksi berbasis rumah dan sektor non-formal. Komite mendorong India untuk menyetor penerimaannya terhadap amandemen Pasal 20, Paragraf 1 konvensi dan menandatangani serta meratifikasi *Optional Protocol* CEDAW sesegera mungkin. Komite juga mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang yang ada dan melarang praktik-praktik seperti *dowry* dan diskriminasi berbasis kasta (Committee on the Elimination of & Discrimination against Women (CEDAW), 2000).

Disamping rekomendasi-rekomendasi dari CEDAW yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, CEDAW juga memiliki *General Recommendation* (GR) 30. Tujuan dari GR 30 CEDAW adalah untuk menyediakan kerangka kerja bagi para aktivis untuk mengkontekstualisasikan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan, rencana pembangunan nasional, dan mengurangi diskriminasi perempuan di India. GR 30 ini dinilai mampu mengurangi diskriminasi perempuan, karena CEDAW sifatnya mengikat bagi pemerintah India. GR-30 juga memberi perempuan masyarakat sipil dengan tujuan bersama untuk berkumpul dan membentuk aliansi agar dapat mendorong perempuan dalam agenda perdamaian dan keamanan pada masa mendatang (Chowdhury, 2016).

## IMPLEMENTASI CEDAW TERHADAP DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM TRADISI PEMBERIAN DOWRY DI INDIA

Feminisme memandang bahwa dalam kasus *dowry*, tindakan pelanggaran HAM pada wanita tidak dapat ditolerir, karena nilai budaya *dowry* dijadikan suatu kebenaran dalam melakukan kekerasan terhadap wanita. Pemerintah India mengeluarkan kebijakan penghapusan *dowry* karena meningkatnya kasus tersebut dengan cara membuat undang-undang yang diberi nama *Dowry Prohibition Act*



1961. Undang-undang tersebut melarang sistem pernikahan dengan *dowry* dan mengajak masyarakat India untuk menikah berdasarkan cinta dan kasih sayang. Hal ini juga mempengaruhi kinerja pemerintah yang mengacu pada konsep *good governance* dan organisasi internasional, dimana keduanya harus bersama-sama mengemban tanggung jawab demi penyelesaian masalah diskriminasi wanita akibat *dowry*. Namun dalam penerapannya di lapangan, pemerintah menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.

Hambatannya adalah tidak banyaknya pihak yang mengajukan gugatan atas tradisi ini dan oleh banyak pihak, undang-undang yang dibuat pemerintah tidak benar-benar mampu menghentikan praktek *dowry* di masyarakat, sehingga dianggap sebagai *toothless bill*. Kebanyakan investigasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak berhasil membawa pelaku kekerasan mendapat sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Kekerasan terhadap perempuan masih dianggap sebagai sebuah kasus yang tidak memerlukan perhatian (Amandha, 2011).

Pada pembukaan konstitusi India, prinsip-prinsip kesetaraan terhadap perempuan dan pemberdayaan terhadap perempuan telah mendorong negara untuk mengambil langkah yang tegas atas segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan mendukung agar perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya telah ditetapkan dalam undang-undang di India (Krishnan, 2017), yang termuat dalam Pasal 14 (kesetaraan aspek politik, ekonomi dan sosial) dan Pasal 15 (melarang diskriminasi terhadap setiap warga negara atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin). Wanita seringkali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, jika hukum yang di anut didasarkan pada adat dan kebiasaan. Mahkamah Agung India sering menyelesaikan masalah dengan cara merujuk pada konvensi internasional dan HAM, misalnya CEDAW, sehingga apabila terjadi pertentangan hukum, hukum adat dan kebiasaan tersebut bisa dipatahkan kedudukannya dalam pengadilan (Mullatti, 1995).

Berdasarkan laporan periodik pemerintah India terhadap Komite CEDAW pada tahun 2012, pemerintah pusat di India telah berusaha untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan di India dengan cara mengeluarkan berbagai program untuk menghilangkan diskriminasi antara pria dan wanita. Contoh program dari pemerintah adalah pemerintah berusaha menghilangkan stereotip terhadap gender dengan melibatkan media dan sekolah-sekolah pernikahan anak di bawah umur, *sati*<sup>6</sup>, aborsi selektif, skema *sumangali* (pekerja anak), dan lain-lain telah dilarang melalui perundang-undangan dan didukung juga dengan program-program serta interaksi dengan masyarakat. Pemerintah India juga mendorong perempuan di negaranya untuk aktif dalam berbagai bidang legislatif, militer, dan lain-lain.

Pemerintah India melalui beberapa aturan telah melarang pemberian *dowry* dalam *Dowry Prohibition Act*, *Indian Penal Code*, dan *The Protection of Women from Domestic Violence Act* dan mengamandemen beberapa hukum adat. Terdapat peraturan di India yang memperbolehkan istri menuntut perceraian, hal tersebut

---

<sup>6</sup> *Sati* adalah budaya India yang berasal dari tradisi hindu kuno dimana seorang janda melakukan bunuh diri dengan cara membakar dirinya. Budaya ini awalnya dilakukan secara sukarela karena perempuan menganggap dirinya adalah bagian dari suaminya lalu jika suaminya meninggal ia pun ikut mati dengan cara membakar dirinya.

diatur dalam *Acts on Marriage and Divorce* (Qasmi, n.d.). Dengan adanya peraturan tersebut, istri yang mengalami penganiayaan selama pernikahannya dapat menuntut cerai kepada suaminya. Sayangnya, proses perceraian dalam undang-undang ini membutuhkan prosedur yang rumit, biaya dan waktu yang cukup lama, sehingga berdasarkan faktor-faktor tersebut, istri seringkali memilih untuk tetap bertahan dalam pernikahannya, walaupun dalam kondisi pernikahan yang tidak baik dan dapat membahayakannya. Terdapat beberapa peran pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW sebagai berikut:

### **1. Peran Pemerintah dan UN Women dalam Implementasi CEDAW untuk Mengatasi Diskriminasi Perempuan di India**

UN Women adalah salah satu entitas PBB yang bekerja untuk mengurangi tingkat diskriminasi terhadap perempuan dan memberdayakan perempuan serta anak-anak perempuan. UN Women terbentuk pada bulan Juli 2010 dan mulai beroperasi pada Januari 2011 (UN Women, n.d.-a). UN Women sebagai organisasi internasional memiliki misi yang sama dengan CEDAW, yaitu menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memperjuangkan hak asasi perempuan agar dapat berlaku dalam lingkup internasional. Pembentukan UN Women bertujuan untuk mendukung badan antar pemerintah seperti komisi status perempuan, membantu negara anggota dalam implementasi standar-standar yang diberikan oleh UN Women, dan menjaga akuntabilitas sistem PBB dalam hal kesetaraan gender (Wikipedia, n.d.).

UN Women cukup memiliki peran yang penting di India, dimana badan tersebut mengadvokasi rencana dan anggaran responsif gender. Program Penganggaran Responsif Gender telah menghasilkan banyak inisiatif advokasi dengan pemangku kepentingan pemerintah termasuk Kementerian Keuangan. Di India, UN Women telah mendukung semua inisiatif Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak untuk kesetaraan gender terutama untuk mengurangi diskriminasi perempuan di India. Pada tahun 2009, UN Women telah menyelenggarakan tiga lokakarya di seluruh India tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Kementerian terkait dan masyarakat sipil (UN Women, n.d.-b).

Untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan, UN Women juga mengelola dana hibah di bawah Dana Perwalian PBB. Dana Perwalian adalah satu-satunya mekanisme pemberian hibah multilateral yang dikhususkan untuk mendukung upaya lokal dan nasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak (UN Women, n.d.-d). UN Women juga bekerja sama dengan perwakilan perempuan terpilih dan membantu mendidik mereka tentang hak-hak mereka, sehingga mereka dapat mempengaruhi keadilan dan layanan publik (UN Women, n.d.-c). Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program *Orange the World*

Program Kampanye "*Orange The World*" adalah program dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menekankan pada pentingnya tindakan yang kuat untuk memastikan perempuan dan anak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan. Warna oranye yang digunakan sebagai nama program

bertujuan untuk menggambarkan masa depan yang cerah bagi semua wanita (United Nations Development Programme (UNDP), 2017).

- *Women Self Defense Training*

Program *women self-defense training* atau bela diri perempuan dikeluarkan oleh pemerintah India mendorong para sekolah negeri dan swasta untuk melatih para siswi dalam bela diri. Program ini tidak hanya diajarkan kepada siswi perempuan, melainkan juga kepada korban-korban di dalam kasus kekerasan karena *dowry*. Maksud dari program ini adalah untuk melindungi perempuan dari ancaman-ancaman kejahatan yang sekiranya akan menghampirinya (M & Narasimhan, 2016).

- Program *The Bell Bajao*

*The Bell Bajao (Ring the Bell)* adalah salah satu kampanye yang mencoba mengubah sikap orang terhadap kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan mereka. Kampanye ini menunjukkan bahwa kejahatan semacam itu dapat dihentikan dengan hanya membunyikan bel pintu atau berbicara. Kampanye ini menargetkan pria dan anak lelaki untuk melibatkan diri mereka dan membuat mereka memainkan peran yang lebih proaktif untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye kesadaran dan intervensi didanai oleh UN Women dan dilaksanakan oleh Breakthrough Trust (Ramadurai, 2014).

## 2. Program CARE dalam Mengatasi Diskriminasi Perempuan di India

Program CARE (*Cooperative and Assistance for Relief Everywhere*) merupakan LSM internasional yang berfokus pada permasalahan kemanusiaan, terutama masalah-masalah yang dialami oleh kaum perempuan di dunia internasional. Tujuan awal dibentuknya CARE Internasional adalah untuk memberikan pertolongan bagi korban Perang Dunia II di Eropa karena organisasi ini terbentuk pasca perang tersebut. CARE Internasional telah beroperasi selama lebih dari 70 tahun di 95 negara diseluruh dunia dan memiliki 14 konfederasi CARE yang tersebar di setiap benua di seluruh dunia (CARE India, n.d.-g).

- Program Pendidikan

- a. Program *Early Childhood Development (ECD)*

ECD (*Early Childhood Development*) merupakan salah satu program CARE yang berlokasi di Chhatisgarh. Program ini menjadi program inisiatif dari Pemerintah India yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi anak-anak untuk pendidikan pra-sekolah, kesehatan dan Imunisasi di Pusat Angwandi (AWCs). Masa pendidikan anak usia dini merupakan suatu tahap yang paling signifikan dalam tumbuh kembang seorang individu. Masa anak-anak berumur 0-6 tahun adalah masa yang tepat untuk memasukkan pendidikan dikarenakan mereka akan sangat cepat mencontohi perbuatan orang-orang yang berada di sekitarnya (CARE India, n.d.-a).

b. *Program Adolescent Girls' Learning Centre (AGLC)*

Program ini merupakan salah satu program CARE yang dilaksanakan di daerah Kutch, Gujarat untuk menjamin kelanjutan pendidikan bagi anak-anak perempuan yang tidak pernah mendapat pendidikan dan putus sekolah. Program ini memperdayakan remaja perempuan melalui kegiatan belajar dari tingkat dasar, keterampilan membaca, berhitung, dan memberikan mereka keterampilan hidup untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka melalui pengenalan berbagai kegiatan-kegiatan yang dipenuhi dengan hal-hal seperti budaya dan olahraga yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan anak-anak perempuan. Tujuan dari keterampilan AGLCs ini adalah agar anak-anak perempuan dapat memiliki kemandirian ekonomi yang dapat dipergunakan dalam kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

c. *Program Udaan*

*Udaan* merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menjamin pendidikan bagi anak-anak perempuan yang berasal dari kelompok yang termajinalkan. Program CARE ini berlokasi di Uttar Pradesh, Bihar, Odisha dan Haryana. *Udaan* CARE International melalui CARE India dibantu oleh LSM Lokal telah melaksanakan program *Udaan* pada negara bagian Uttar Pradesh (Distrik Hardoi), Bihar (Distrik Madhubani), Odisha (Distrik Mayurbhanj) dan Haryana (Distrik Mewat dekat Delhi) (CARE India, n.d.-f).

• *Program Kesehatan*

a. *Madhya Pradesh Nutrition Project (MPNP)*

Program MPNP yang di berlokasi Distrik Tikamgarh, Panna dan Chhatarpur di Madhya Pradesh bertujuan untuk mengentaskan permasalahan gizi buruk ditiga distrik di daerah Bundelkhand dari Madhya Pradesh. Program MPNP ini menawarkan kesempatan untuk memberikan dukungan jangka panjang untuk pengembangan layanan anak terpadu pada negara bagian Madhya Pradesh (CARE India, n.d.-b).

b. *Mother and Child Health (MCH) Project*

*Mother and Child Health* merupakan salah satu proyek yang diimplementasikan CARE melalui kerjasama dengan media BBC di Odisha dan Madhya Pradesh. Odisha dan Madhya Pradesh merupakan dua daerah termiskin di India dan memiliki tingkat kesehatan ibu dan anak yang terburuk di India. Madhya Pradesh memiliki tingkat kematian bayi yang tertinggi di India yaitu 67% per 10.000 kelahiran, sedangkan Odisha sebesar 62% dari 100.000 kelahiran. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menurunkan angka kekurangan gizi pada bayi dan anak serta memperbaiki perilaku ibu ke arah yang lebih positif (CARE India, n.d.-c).

c. *Reproductive and Child Health Nutrition and Awareness*

Program ini didukung oleh *CAIRN India Limited* dan berlokasi di Rajasthan. Maksud dari program ini adalah untuk berkontribusi meningkatkan status kesehatan perempuan di kabupaten tersebut dengan

memobilisasi masyarakat untuk kesehatan yang lebih baik. Fokus dari program ini adalah pengurangan angka kematian Ibu dan bayi, peningkatan kebersihan mengenai menstruasi dan kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan dan wanita. Program ini telah memperluas intervensi dengan memasukkan komponen-komponen kebersihan menstruasi di antara wanita dan gadis remaja melalui kegiatan kewirausahaan (CARE India, n.d.-d).

- *Program Ekonomi*

- a. *The Women's Empowerment Principles (WEPS)*

*The Women's Empowerment Principles* (WEPs) adalah seperangkat prinsip yang menawarkan panduan untuk bisnis tentang cara mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tempat kerja, pasar dan masyarakat. Tujuan dari program ini agar perempuan dapat mendapat keadilan serta perlakuan yang setara dengan laki-laki di tempat kerja. Hal-hal yang termasuk pada prinsip program ini adalah upah yang sama antara perempuan dan laki-laki, dan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku pelecehan seksual di tempat kerja (CARE India, n.d.-e).

- b. *Women Leadership in Small and Medium Enterprises (WLSME)*

*Women Leadership in Small and Medium Enterprises* adalah program yang dimulai dari tanggal 28 September 2012 hingga 27 September 2015 ini dilaksanakan di distrik Cuddalore di Tamil Nadu, India. Program ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor penentu utama dari UKM yang dipimpin oleh perempuan yang berhasil dalam hal keuntungan yang di dapat (CARE India, n.d.-h).

- *Program Advokasi*

CARE memberikan program advokasi yang ditujukan pada masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial terkait perempuan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada perempuan. Kegiatan ini di bentuk agar dapat mempengaruhi kawasan, negara, level nasional dan global dalam merefleksikan keadilan dan perhatian bagi kelompok-kelompok yang termajinakan, masyarakat miskin, ketidakadilan sosial, dan juga permasalahan gender. Dalam menangani isu-isu permasalahan gender, CARE telah aktif bekerja dalam forum publik dan membantu mereka dalam mendapatkan hak-hak mereka (CARE India, 2013).

### **3. Dampak dari Diratifikasinya CEDAW di India terhadap Diskriminasi Perempuan di India**

Dalam penerapannya, India telah mencoba untuk menggunakan seluruh instrumen yang ada di negaranya baik dari kebijakan, aturan, sanksi atau hukuman dan peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program-programnya yang dibantu oleh organisasi internasional. Akan tetapi, kebijakan dari pemerintah dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India kurang memberikan dampak yang signifikan dalam penerapannya, dilihat dari data-data

kasus diskriminasi terhadap perempuan yang angkanya cenderung meningkat. Angka kematian untuk kasus *dowry deaths* meningkat, kasus-kasus pengguguran bayi masih banyak ditemukan, kasus-kasus *human trafficking* atau perbudakan seks masih banyak ditemukan dan kasus-kasus diskriminasi perempuan lainnya masih menunjukkan angka yang tinggi. Peratifikasian CEDAW ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang efektif untuk menangani masalah diskriminasi perempuan di India karena banyak faktor yang menyebabkan masalah diskriminasi perempuan terus bertambah.

Faktanya, institusi kepolisian dan kehakiman di India kurang maksimal dalam menerapkan hukum dan aturan yang telah pemerintah buat dan cenderung kurang berpihak kepada perempuan sebagai korban. Hal tersebut disebabkan oleh sistem patriarki di dalam sistem hukum di India. Diskriminasi terhadap perempuan di India juga bersumber pada sistem patriarki, tradisi dan budaya yang sudah mengakar pada masyarakatnya. Menurut penulis, kebijakan-kebijakan yang ada di India seharusnya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tentang diskriminasi dan kekerasan perempuan tetapi juga kepada masalah kultural yang ada di India. Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan juga kesadaran masyarakatnya untuk menghilangkan ajaran budaya-budaya yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

## KESIMPULAN

Berbagai macam diskriminasi yang terjadi pada perempuan di India adalah contoh dari permasalahan India yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah India. Hal ini menjadi sorotan dalam negeri dan juga dunia internasional ketika jumlah diskriminasi pada perempuan turut bertambah. Adanya dominasi yang dilakukan laki-laki kepada perempuan bukan hanya bersifat psikologis maupun pelecehan, melainkan juga serangan fisik seperti pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan. Perempuan dianggap sebagai individu yang lemah oleh masyarakat di India, dan menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang derajatnya lebih tinggi dan lebih hebat dibanding dengan perempuan, yang kemudian menyebabkan ketidaksetaraan terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan di India, baik dalam lingkup keluarga maupun dilingkup publik. Penelitian ini fokus pada diskriminasi perempuan dalam tradisi pemberian *dowry* yang bahkan bisa berakibat sampai pada pembunuhan terhadap pengantin wanita.

Terdapat dua macam kekerasan yang terjadi di India yaitu, kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berdasarkan pada sistem hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan pada masyarakat, sedangkan kekerasan kultural adalah kekerasan yang terbentuk oleh sikap, perasaan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Kekerasan dalam hal tradisi pemberian *dowry* termasuk dalam kekerasan kultural, dimana *dowry* ini muncul dari tradisi Hindu yang mengharuskan pengantin perempuan membayar *dowry* kepada pengantin laki-laki sebelum menikah. Kekerasan karena tradisi pemberian *dowry* ini biasanya terjadi karena keluarga dari sang pengantin wanita tidak dapat memenuhi permintaan mahar dari keluarga laki-laki, sehingga sang pengantin wanita banyak mendapat tindak kekerasan oleh suami dan keluarganya, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Dalam menyelesaikan masalah diskriminasi perempuan di negaranya,

pemerintah India dibantu oleh organisasi-organisasi internasional seperti UN *Women* dan CARE.

UN *Women* merupakan salah satu badan PBB yang menaruh perhatian pada kekerasan terhadap perempuan. Masuknya UN *Women* di India untuk merespon kekerasan *dowry death* dilakukan dengan bekerja bersama kelompok masyarakat sipil, pemerintah India, mitra lokal, dan organisasi lain untuk membuat program-program yang dikhususkan untuk mengakhiri kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan. Implementasi program-program UN *Women* dalam merespon kasus *dowry death* melalui beberapa programnya mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah India. Upaya-upaya yang dilakukan UN *Women* telah menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membantu kehidupan perempuan di India, meskipun kasus *dowry death* yang terjadi di India belum mampu dihapuskan. Selain organisasi internasional UN *Women*, terdapat juga salah satu organisasi lain yaitu organisasi CARE. Organisasi CARE turut membantu pemerintah India dalam mengurangi jumlah kasus-kasus diskriminasi perempuan di India melalui beberapa agenda yang dilakukan oleh organisasi CARE di India.

## REFERENSI

- Agarwal, S., & Nayagam, C. (2017, October 7). *Dowry: The Dark side of Indian Weddings*. Media India. <https://mediaindia.eu/society/dowry-the-dark-side-of-indian-weddings/>
- Amandha, S. T. (2011). *Pemikiran Feminisme dalam Hubungan Internasional* [Presentasi Seminar Nasional]. Academia.Edu. [https://www.academia.edu/3404285/Pemikiran\\_Feminisme\\_dalam\\_Hubungan\\_Internasional](https://www.academia.edu/3404285/Pemikiran_Feminisme_dalam_Hubungan_Internasional)
- Banerjee, P. R. (2014). Dowry in 21st-Century India: The Sociocultural Face of Exploitation. *Trauma, Violence, & Abuse*, 15(1), 34–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1524838013496334>
- Booker, C. (2014, December 14). *Indian community protest against dowries*. <https://amp.theage.com.au/national/victoria/indian-community-protest-against-dowries-20141214-126za2.html>
- Burchill, S., & Linklater, A. (2011). *Teori-teori Hubungan Internasional* (M. Sobirin (Trans.)). Penerbit Nusa Media.
- CARE India. (n.d.-a). *A Journey Towards Knowledge*. <https://www.careindia.org/node/617>
- CARE India. (n.d.-b). *Madhya Pradesh Nutrition Project*. <https://www.careindia.org/madhya-pradesh-nutrition-project>
- CARE India. (n.d.-c). *Mother and Child Health*. <https://www.careindia.org/mother-child-health>
- CARE India. (n.d.-d). *Reproductive and Child Health Nutrition and Awareness*. <https://www.careindia.org/rachna>
- CARE India. (n.d.-e). *The Women's Empowerment Principles*. <https://www.careindia.org/women-empowerment-principles>
- CARE India. (n.d.-f). *Udaan Project*. <https://www.careindia.org/udaan>
- CARE India. (n.d.-g). *Who We Are*. <https://www.careindia.org/who-we-are/>
- CARE India. (n.d.-h). *Women Leadership in Small and Medium Enterprises*.

- <https://www.careindia.org/women-leadership-initiatives>
- CARE India. (2013). *A Journey Towards Knowledge: CARE India Annual Report*. <https://www.careindia.org/wp-content/uploads/2017/05/Annual-Report-2012-13.pdf>
- Chowdhury, E. V. (2016, December 3). *A Case Study on the Complementary Use of CEDAW GR 30 and UNSCR 1325*. Global Network of Women Peacebuilders (GNWP). <https://gnwp.org/wp-content/uploads/India-Case-Study-.pdf>
- Committee on the Elimination of, & Discrimination against Women (CEDAW). (2000). *Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: India*. United Nations. [https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/CONCLUDING\\_COMMENTS/India/India-CO-1.pdf](https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/CONCLUDING_COMMENTS/India/India-CO-1.pdf)
- Crime In Delhi. (2016, December 8). *Data of Dowry Deaths Cases in Delhi*. <http://www.crimeindeli.com/data-dowry-deaths-cases-delhi-crimeindeli/>
- Grindle, M. (2010). Good Governance: The Inflation of an Idea. In *HKS Faculty Research Working Paper Series* (No. RWP10-023). [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4448993/Grindle\\_GoodGovernance.pdf](https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4448993/Grindle_GoodGovernance.pdf)
- Hakim, S. (2017). *Proses advokasi "NGO" dalam penanganan masalah kekerasan seksual di India pasca kasus Nirbhaya* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12208>
- Haspels, N., & Suriyasarn, B. (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. [https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS\\_150508/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_150508/lang-en/index.htm)
- Hidayati, N. (2018). Teori feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Ke-Islaman Kontemporer. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1), 21–29. <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i1.10403>
- Iskandar, P. (2010). *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. IMR Press.
- Jha, P., & Nagar, N. (2015). A Study of Gender Inequality in India. *The International Journal of Indian Psychology*, 2(3), 46–57. <https://doi.org/10.25215/0203.045>
- Karns, M. P., & Mingst, K. A. (2010). *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*. Lynee Rienner Publisher.
- Khanna, B. (2013). CEDAW and The impact on Violence Against Women in India. *UW Bothell Policy Journal*, 31–41. <https://uwbpolicyjournal.files.wordpress.com/2013/06/cedaw-and-the-impact-on-violence-against-women-in-india.pdf>
- Krishnan, A. (2017, August 24). *List of Fundamental Rights in Constitution of India: Supreme Court Rules Privacy as a Fundamental Rights*. India.Com. <https://www.india.com/viral/list-of-fundamental-rights-in-constitution-of-india-supreme-court-rules-privacy-as-a-fundamental-right-2424171/>
- Kusumaningrum, D. N. (2013). Instrumen Kerja Sama Pembangunan Indonesia-Jerman di Yogyakarta. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 106–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.2013.0032.106-119>
- M, V., & Narasimhan, S. (2016, February 15). *In India, Schoolgirls Look Forward to Self-Defense Classes*. Womensenews. <https://womensenews.org/2016/02/in-india-schoolgirls-look-forward-to-self-defense-classes/>
- Mallapur, C. (2015, August 25). *Minor girls and women chief targets in India's surging*



- human trafficking trade*. Scroll.In. <https://scroll.in/article/751298/minor-girls-and-women-chief-targets-in-indias-surg-ing-human-trafficking-trade>
- Mardalis. (2017). *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Masih, N. (2019, May 8). *India's #MeToo movement hits roadblocks*. Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/world/2019/05/08/metoo-hits-roadblocks-india/>
- McCoy, T. (2014, May 30). *India's gang rapes and the failure to stop them*. Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/05/30/indias-culture-of-gang-rape-and-the-failure-to-stop-it/>
- Mullatti, L. (1995). Families in India: Beliefs and Realities. *Journal of Comparative Family Studies*, 26(1), 11–25. <https://www.jstor.org/stable/41602364>
- Nagpal, H. (2017, June 21). *The Historical Journey Of Anti-Dowry Laws*. Feminism in India. <https://feminisminindia.com/2017/06/21/historical-journey-anti-dowry-laws/>
- National Crime Records Bureau. (2015). *Crime in India 2014: Statistics*. [https://ncrb.gov.in/sites/default/files/Statistics/Statistics 2014.pdf](https://ncrb.gov.in/sites/default/files/Statistics/Statistics%202014.pdf)
- National Crime Records Bureau. (2017). *Crime in India 2016: Statistics*. [https://ncrb.gov.in/sites/default/files/Crime in India - 2016 Complete PDF 291117.pdf](https://ncrb.gov.in/sites/default/files/Crime%20in%20India%20-%202016%20Complete%20PDF%20291117.pdf)
- Qasmi, M. K. (n.d.). *Mahar: A Social Heinous Crime*. <http://id.hicow.com/india/dalveerbhandari/muslim-175164.html>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Raju, E. (2014). Gender Discrimination in India. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 2(5), 55–65. <http://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/vol2-issue5/H0255565.pdf>
- Ramadhan, I., & Ma'sumah, I. (2018). Mengkaji peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Perspektif Feminisme. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), 144–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.871>
- Ramadurai, C. (2014, May 1). *This campaign urges men to "Ring the bell" to end domestic violence in India and beyond*. Thecultureist. <https://www.google.co.id/amp/s/www.thecultureist.com/2013/05/01/in-india-one-million-men-pledge-to-end-domestic-violence/amp/>
- Resen, P. T. K. (2012). Kekerasan terhadap Perempuan dan Keamanan Manusia (Studi Kasus: Dowry Murder di India). *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Udayana*, 1–23. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/f8e7df8e37b60498e64aa5995c70885c.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/f8e7df8e37b60498e64aa5995c70885c.pdf)
- Rudy, T. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Refika Aditama.
- Sadli, S. (2010). *Berbeda tapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Salve, P., & Mallapur, C. (2014, October 11). *On Karva Chauth 22 married women will be killed*. IndiaSpend. <https://www.indiaspend.com/on-karva-chauth-22-married-women-will-be-killed-82617/>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Sengar, S. (2019, March 26). *Why India Unable to Control Alarming Number of Rape Cases*. Indiatimes. <https://www.indiatimes.com/news/india/why-is-india-unable-to-control-alarming-number-of-rape-cases-348640.html>

- Shah, S. (2017, August 4). *In 5 Years To 2015, 44% Rise In Crimes Against Women*. <https://archive.indiaspend.com/viznomics/in-5-years-to-2015-44-Rise-in-Crimes-Against-Women-99685>
- Sharma, R. (2015). Gender Inequality in India: Causes and Remedies. *Research Journal of Management Sociology & Humanity (IRJMSSH)*, 6(8), 142–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.32804/IRJMSSH>
- Shastri, A. (2014). Gender Inequality and Women Discrimination. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 19(11), 27–30. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1077.219&rep=rep1&type=pdf>
- Shiva, V. (Ed.). (1997). *Bebas dari Pembangunan: Perempuan dan Perjuangan Hidup di India* (H. Jhamtani, Trans.). Yayasan Obor Indonesia & KONPHALINDO.
- UN Women. (n.d.-a). *About UN Women*. <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- UN Women. (n.d.-b). *India National Planning and Budgeting Programmes*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india/national-planning-and-budgeting/programmes>
- UN Women. (n.d.-c). *India Programmes*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india/programmes>
- UN Women. (n.d.-d). *UN Women Strategy*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india/violence-against-women/un-women-strategy>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2017). *Orange the World*. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/orange-the-wprld.html>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR). (n.d.-a). *CEDAW*. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR). (n.d.-b). *Human Rights: CEDAW*. [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-8&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en)
- Usman, H. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- VOA News. (2017, May 31). *Big Data Maps India's Human Traffic Hot Spots*. <https://www.voanews.com/silicon-valley-technology/big-data-maps-indias-human-traffic-hot-spots>
- Wikipedia. (n.d.). *UN Women*. [https://en.wikipedia.org/wiki/UN\\_Women](https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women)